PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13, Number 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

ANALISIS KRITIS KETERGANTUNGAN TRANSFER PUSAT DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN FISKAL: STUDI KASUS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

CRITICAL ANALYSIS OF CENTRAL TRANSFER DEPENDENCE AND THE CHALLENGE OF FISCAL INDEPENDENCE: A CASE STUDY OF BOJONEGORO REGENCY IN 2025

Revienda Anita Fitrie [1*], Nur Ulfa Amelia [2], Fiona Putri Tampubolon [3], Ratnasari Dewi Faradilla [4], Robi'atul Adawiyah [5], Rayshya Chauliya Nadina Putri [6], Alvian Pratista Hananto [7], Putri Nendi Kirani [8]

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia [1,2,3,4,5,6,7,8]

**Corresponding author*: *reviendafitrie@unesa.ac.id*

ARTICLE INFO

Submitted:
May 1, 2026
Review:
Juny 1, 2026
Accepted:
July 1, 2026
Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA) :
Anita, R., Amelia, N., Tampubolon, F., Faradilla, R., Adawiyah, R., Putri, R., Hananto, A., & Kirani, P. (2026). ANALISIS KRITIS KETERGANTUNGAN TRANSFER PUSAT DAN TANTANGAN KEMANDIRIAN FISKAL STUDI KASUS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 26-35. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.700

DOI: *https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.700*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis struktur ketergantungan transfer pusat dan tantangan kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro pada 2025 setelah peningkatan produksi Lapangan Banyu Urip melalui proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC). .Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan analisis dokumen dan rasio fiskal atas data realisasi 2022–2025. Sumber utama meliputi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistem Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta dokumen resmi sektor migas. Kemandirian diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan, sedangkan ketergantungan dihitung dari transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan. Hasil menunjukkan bahwa proporsi PAD meningkat dari 13,94% pada 2022 menjadi 17,73% pada 2025, tetapi transfer pusat tetap dominan sebesar 80,01% pada 2025. Dengan demikian, masalah utama bukan penurunan PAD, melainkan persistensi struktur pendapatan yang sangat bergantung pada transfer. Pada 2025, belanja pegawai dan barang/jasa mencapai sekitar 49,74% dari total belanja, sedangkan belanja modal 18,44%; pola ini bersifat deskriptif dan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kausal flypaper effect. Implikasi penelitian menekankan penguatan kualitas PAD, pengelolaan risiko volatilitas DBH, dan perlindungan ruang fiskal bagi belanja produktif. Keterbatasan studi adalah desain satu kasus berbasis dokumen yang tidak menguji hubungan kausal.

Kata Kunci: kemandirian fiskal; transfer pusat; PAD; DBH migas; Bojonegoro

ABSTRACT

This study examines central-transfer dependence and the challenge of fiscal independence in Bojonegoro Regency in 2025 following the production increase at the Banyu Urip Field through the Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) project. A descriptive case-study design combines document analysis with fiscal-ratio analysis of realized data for 2022–2025. The primary sources are Bojonegoro local government financial reports, the Ministry of Finance regional fiscal information system, and official oil-and-gas documents. Fiscal independence is measured as locally generated revenue (PAD) divided by total regional revenue, while dependence is measured as central-government transfers divided by total regional revenue. The PAD share increased from 13.94% in 2022 to 17.73% in 2025, yet central transfers

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

remained dominant at 80.01% in 2025. Thus, the key problem is not a collapse of PAD but the persistence of a transfer-dominated revenue structure. In 2025, personnel and goods/services expenditure represented approximately 49.74% of total spending, while capital expenditure represented 18.44%; this pattern is descriptive and does not constitute causal evidence of a flypaper effect. The findings imply the need to strengthen the quality of PAD, manage revenue-sharing volatility, and protect fiscal space for productive spending. The single-case documentary design limits causal inference.

***Keywords**: fiscal independence; central transfers; local own-source revenue; oil and gas revenue sharing; Bojonegoro*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil minyak utama di Indonesia. Pada 2025, penyelesaian kegiatan pengeboran BUIC meningkatkan produksi Lapangan Banyu Urip dari sekitar 150.000 menjadi sekitar 180.000 barel per hari dan menyumbang kurang lebih seperempat lifting minyak nasional (Kementerian ESDM, 2025). Posisi strategis tersebut menciptakan kapasitas fiskal yang besar melalui skema bagi hasil dan transfer antarpemerintahan, tetapi besarnya kapasitas fiskal tidak identik dengan kemandirian fiskal. Kemandirian lebih tepat dinilai dari kemampuan daerah membiayai pelayanan dan pembangunan dengan sumber pendapatan yang dapat dipengaruhi secara langsung oleh pemerintah daerah, terutama PAD.

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara transfer, kekayaan sumber daya, dan kemandirian fiskal tidak bersifat tunggal. Hilmawan dan Clark (2019), misalnya, tidak menemukan bukti umum bahwa ketergantungan pada sumber daya alam selalu menurunkan pendapatan daerah; temuan tersebut memperingatkan agar konsep resource curse tidak digunakan sebagai label otomatis. Pada sisi lain, Aritenang (2020) menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah dapat memengaruhi komposisi belanja infrastruktur, sedangkan Chalil (2018) dan Tanjung et al. (2021) menegaskan bahwa pengujian flypaper effect memerlukan pembandingan respons belanja terhadap transfer dan terhadap pendapatan sendiri, bukan sekadar membaca besarnya rasio transfer.

Studi yang lebih baru juga memperlihatkan hasil yang campuran. Saptono dan Mahmud (2023) menemukan bahwa beberapa jenis transfer justru dapat mendorong penerimaan pajak lokal. Syafri et al. (2024) dan Ulah (2025) tetap menempatkan kapasitas PAD dan struktur transfer sebagai faktor penting bagi kemandirian keuangan daerah, sedangkan Kinanti dan Santorry (2025) menemukan hubungan transfer dengan kemandirian dalam konteks kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Bojonegoro, Sholikin (2018) menyoroti tata kelola sumber daya minyak dalam konteks otonomi daerah; Bisri et al. (2025) membahas optimalisasi DBH migas, dana abadi, dan efisiensi fiskal; sedangkan Brunnschweiler et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi penerimaan sumber daya harus dibaca bersama realitas keterlibatan warga. Keseluruhan studi tersebut menunjukkan bahwa dominasi transfer perlu dianalisis sebagai struktur fiskal terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan mekanisme kausal seperti flypaper effect atau resource curse.

Bukti empiris lain memperkuat kebutuhan analisis yang lebih hati-hati. Haryanto (2017) membandingkan kinerja fiskal daerah berbasis sumber daya dan non-sumber daya, sedangkan Khairi (2021) membahas keseimbangan antara penyerahan kewenangan dan sumber penerimaan daerah. Alazhari dan Hendaris (2025) menemukan bahwa tax effort berhubungan positif dengan kemandirian, sedangkan Hidayat et al. (2024) menunjukkan pentingnya PAD dan transfer dalam menjelaskan variasi kemandirian di Sumatera Utara.

Nurosidah et al. (2023) membuktikan flypaper effect dengan regresi atas perubahan transfer pada masa pandemi, sehingga memperjelas bahwa pengujiannya membutuhkan desain inferensial. Putri et al. (2025) mengaitkan PAD dan transfer dengan efisiensi keuangan pemerintah daerah. Yasa (2021) menempatkan pembagian penerimaan sumber daya dalam kerangka otonomi dan pluralisme hukum, sementara Meliza dan Ulum (2025) menunjukkan bahwa kualitas institusi relevan ketika menilai penerimaan berbasis sumber daya. Secara spesifik untuk Bojonegoro, Rahmawati dan Kartikasari (2025) menyediakan pembacaan kondisi keuangan 2022–2024 yang berguna sebagai pijakan sebelum memasukkan realisasi 2025.

Tabel 1. Peta Literatur dan Posisi Penelitian

Studi	Lokus/metode	Temuan utama	Ruang yang tersisa
Hilmawan & Clark (2019)	Panel kabupaten/kota; sumber daya alam	Tidak menemukan bukti umum resource curse terhadap pendapatan daerah.	Perlu analisis spesifik struktur fiskal Bojonegoro terbaru.
Aritenang (2020)	Indonesia; transfer dan belanja infrastruktur	Transfer berkaitan dengan pola belanja infrastruktur.	Belum mengisolasi kondisi daerah penghasil migas pada 2025.
Tanjung et al. (2021)	Metode pengujian flypaper effect	Flypaper perlu diuji melalui respons belanja terhadap transfer dan PAD.	Rasio transfer saja tidak cukup untuk klaim kausal.
Saptono & Mahmud (2023)	Indonesia; transfer dan pajak lokal	Sebagian transfer dapat crowd-in penerimaan pajak lokal.	Arah hubungan transfer-PAD tidak boleh diasumsikan negatif.
Syafri et al. (2024)	Kabupaten/kota Indonesia	Kemandirian dipengaruhi basis penerimaan dan karakter fiskal daerah.	Diperlukan pembacaan tingkat daerah yang lebih kontekstual.
Bisri et al. (2025); Brunnschweiler et al. (2025)	Bojonegoro; DBH/dana abadi dan transparansi penerimaan	Tata kelola penerimaan migas memerlukan kesiapan instrumen dan akuntabilitas.	Belum merekonsiliasi struktur realisasi pendapatan penuh 2025 pasca-BUIC.

Sumber: sintesis penulis dari literatur yang dikutip.

Research gap penelitian ini terletak pada belum tersedianya pembacaan yang menggunakan realisasi penuh 2025 untuk menguji seberapa besar dominasi transfer pusat setelah peningkatan produksi BUIC, sekaligus membedakan antara ketergantungan struktural dan klaim kausal tentang perilaku belanja. Kontribusi penelitian ini bersifat terukur dalam tiga hal: (1) memperbarui struktur pendapatan Bojonegoro dengan data realisasi 2022–2025; (2) memisahkan transfer pemerintah pusat dari total transfer agar rasio tidak tercampur dengan transfer antardaerah; dan (3) membatasi interpretasi flypaper effect pada apa yang benar-benar didukung oleh desain deskriptif.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana struktur ketergantungan transfer pusat Kabupaten Bojonegoro pada 2025, bagaimana perubahannya selama 2022–2025, dan apa implikasinya bagi kemandirian fiskal daerah? Tujuannya adalah memetakan struktur pendapatan dan belanja secara konsisten, menilai tingkat kemandirian berbasis PAD, serta merumuskan implikasi kebijakan yang diturunkan langsung dari data yang tervalidasi.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif dengan dua lapis analisis: analisis kuantitatif-deskriptif atas rasio fiskal dan analisis kualitatif atas dokumen kebijakan. Periode 2022–2025 dipilih untuk menyediakan empat tahun observasi terbaru yang dapat dibandingkan dan berakhir pada realisasi penuh tahun 2025, sehingga penelitian tidak lagi menggunakan proyeksi 2024–2025.

Dokumen dipilih berdasarkan empat kriteria: (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah atau merupakan artikel ilmiah terpublikasi; (2) memuat data langsung tentang pendapatan, transfer, belanja, DBH, atau produksi migas Bojonegoro; (3) berada dalam periode analisis atau menyediakan komparasi terhadap periode tersebut; dan (4) menggunakan angka realisasi atau angka resmi terbaru. Data fiskal 2022–2024 diekstrak dari Catatan atas Laporan Keuangan/LRA Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2024, 2025a), sedangkan realisasi 2025 menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah DJPK sampai Desember 2025 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2026). Konteks produksi BUIC menggunakan publikasi Kementerian ESDM, dan realisasi DBH migas 2025 diverifikasi dengan publikasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Unit analisis adalah komponen pendapatan dan belanja tahunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Variabel utama meliputi total pendapatan daerah, PAD, transfer pemerintah pusat, total transfer, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rasio kemandirian operasional dihitung sebagai PAD dibagi total pendapatan daerah dikalikan 100%. Rasio ketergantungan transfer pusat dihitung sebagai transfer pemerintah pusat dibagi total pendapatan daerah dikalikan 100%. Untuk 2022–2024, transfer pusat merupakan penjumlahan pos Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya karena keduanya disajikan terpisah; rasio total transfer disajikan sebagai informasi konteks dan mencakup transfer antardaerah.

Prosedur ekstraksi dilakukan dengan memasukkan nominal tiap komponen ke matriks tahun-sumber, menyetarakan satuan ke triliun rupiah, menghitung kembali persentase, lalu melakukan pemeriksaan aritmetika terhadap total pendapatan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber resmi, rekonsiliasi antar-tahun, dan pemeriksaan konsistensi persentase dengan nominal. Dokumen kemudian dikodekan secara deduktif ke dalam lima tema: dominasi transfer, kapasitas PAD, struktur belanja, volatilitas penerimaan berbasis sumber daya, dan tata kelola instrumen diversifikasi. Karena desainnya deskriptif dan hanya satu kasus, penelitian ini tidak mengestimasi efek kausal transfer terhadap belanja maupun PAD; istilah flypaper effect digunakan hanya dalam pembahasan literatur, bukan sebagai temuan kausal penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Migas 2025 dan Posisi Fiskal Bojonegoro

Pada 2025, penyelesaian pengeboran BUIC mendorong produksi Lapangan Banyu Urip dari sekitar 150.000 menjadi sekitar 180.000 barel per hari (Kementerian ESDM, 2025). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaporkan realisasi DBH migas 2025 sekitar Rp1,94 triliun (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2025b). Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan berbasis migas merupakan komponen material, tetapi tidak identik dengan keseluruhan transfer pusat. Pada tahun yang sama, transfer pemerintah pusat dalam SIKD mencapai sekitar Rp5,18 triliun. Karena itu, analisis kemandirian perlu memisahkan DBH migas dari keseluruhan arsitektur transfer untuk menghindari atribusi berlebihan terhadap satu sumber penerimaan.

Struktur Pendapatan dan Kemandirian Fiskal 2022–2025

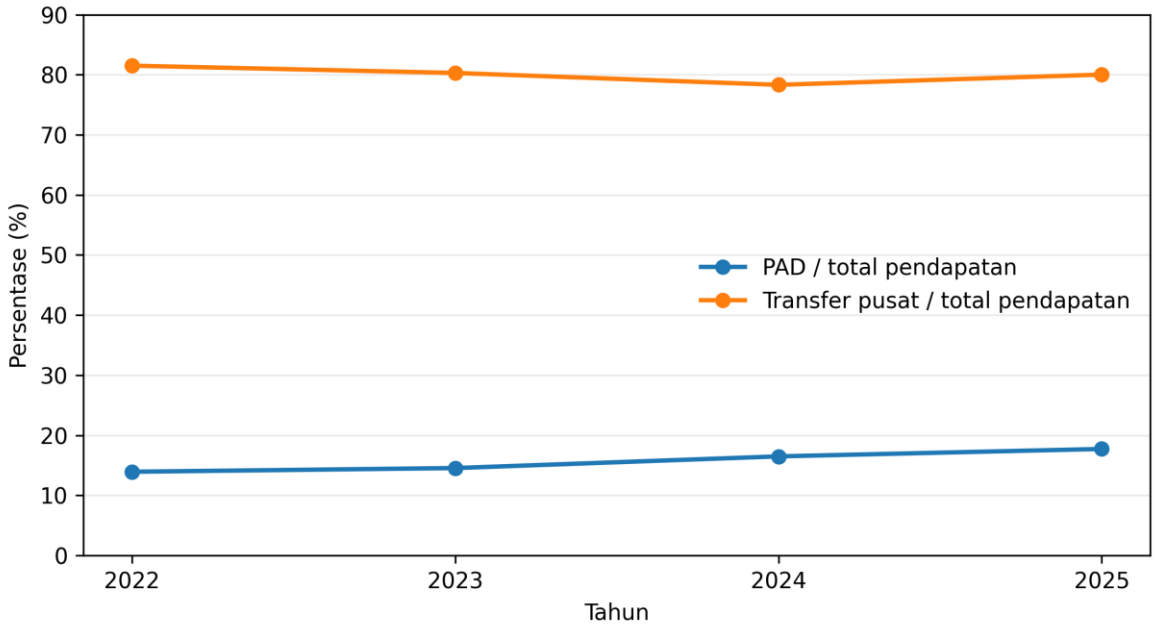
Tabel 2. Struktur Pendapatan dan Rasio Kemandirian Fiskal Bojonegoro, 2022–2025

Tahun	Total pendapatan (Rp T)	PAD (Rp T)	PAD / total (%)	Transfer pusat (Rp T)	Transfer pusat / total (%)	Total transfer / total (%)
2022	5.77	0.80	13.94	4.70	81.50	84.90
2023	6.02	0.88	14.55	4.83	80.29	84.18
2024	5.72	0.94	16.50	4.48	78.31	82.14
2025	6.47	1.15	17.73	5.18	80.01	82.27

Sumber: LRA/Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro 2022–2024 dan SIKD DJPK 2025; diolah penulis. Catatan: Rp T = triliun rupiah.

Tabel 2 mengubah interpretasi naskah awal secara substantif. Proporsi PAD tidak menurun menuju 10,68% pada 2025, tetapi meningkat dari 13,94% pada 2022 menjadi 17,73% pada 2025. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap transfer pusat tetap sangat tinggi: 81,50% pada 2022, 80,29% pada 2023, 78,31% pada 2024, dan 80,01% pada 2025. Jika seluruh transfer—termasuk transfer antardaerah—dihitung, rasionya mencapai 82,27% pada 2025. Dengan demikian, temuan yang lebih tepat adalah perbaikan relatif kapasitas PAD yang berjalan bersamaan dengan persistensi dominasi transfer, bukan penurunan PAD yang terus-menerus.

Gambar 1. Perubahan Proporsi PAD dan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Total Pendapatan, 2022–2025



Sumber: diolah penulis dari LRA/Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro dan SIKD DJPK.

Gambar 1 memperlihatkan dua dinamika sekaligus. Pertama, porsi PAD membaik sekitar 3,79 poin persentase antara 2022 dan 2025. Kedua, porsi transfer pusat tetap berada pada kisaran sekitar 78–82% sehingga ruang fiskal Bojonegoro masih sangat dipengaruhi keputusan dan formula transfer antarpemerintah. Secara analitis, kondisi ini dapat disebut ketergantungan struktural. Namun, angka tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa transfer menyebabkan pemerintah daerah kehilangan insentif meningkatkan PAD. Temuan Saptono dan Mahmud (2023) bahkan menunjukkan bahwa pada konteks tertentu transfer dapat berjalan bersama peningkatan pajak lokal. Karena itu, pengujian flypaper effect memerlukan model respons belanja atau estimasi ekonometrik sebagaimana dibahas Chalil (2018) dan Tanjung et al. (2021).

Komposisi pendapatan 2025 menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat sebesar sekitar Rp5,18 triliun jauh lebih besar daripada PAD sebesar sekitar Rp1,15 triliun. Transfer antardaerah sekitar Rp0,15 triliun merupakan komponen tambahan yang sebelumnya berpotensi tercampur dalam perhitungan rasio ketergantungan. Pemisahan ini penting karena rekomendasi kebijakan berbeda: peningkatan PAD menyasar basis penerimaan lokal, sedangkan pengelolaan risiko transfer menyasar ketidakpastian formula, waktu penyaluran, dan volatilitas pendapatan berbasis sumber daya.

Struktur Belanja 2025: Indikasi Ruang Fiskal, Bukan Bukti Kausal

Realisasi belanja daerah 2025 mencapai sekitar Rp6.42 triliun. Belanja pegawai sekitar Rp1.84 triliun dan belanja barang/jasa sekitar Rp1.35 triliun; secara bersama-sama keduanya setara sekitar 49.74% dari total belanja. Belanja modal sekitar Rp1.18 triliun atau 18.44% dari total belanja. Angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang bagi belanja yang memperluas kapasitas ekonomi dan layanan publik, tetapi tidak membuktikan bahwa transfer pusat secara kausal "mengunci" anggaran pada belanja rutin. Untuk

membuktikan mekanisme tersebut diperlukan data panel yang lebih panjang, rincian fungsi belanja, dan model yang menguji respons belanja terhadap perubahan transfer.

Temuan ini sejalan dengan kebutuhan kehati-hatian dalam membaca transfer. Aritenang (2020) menunjukkan bahwa transfer dapat berkaitan dengan pola pengeluaran infrastruktur, sedangkan Akita et al. (2021) menempatkan transfer umum sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Oleh karena itu, dominasi transfer di Bojonegoro seharusnya dibaca bukan sebagai "kegagalan desentralisasi" secara otomatis, melainkan sebagai eksposur fiskal yang perlu dikelola agar kapasitas pendapatan lokal, kualitas belanja, dan ketahanan terhadap perubahan penerimaan sumber daya berkembang secara bersamaan.

Dari Penerimaan Migas ke Ketahanan Fiskal: Mekanisme yang Dapat Didukung Data

Data 2025 memperlihatkan tiga tahap yang dapat diamati tanpa membuat klaim kausal berlebihan. Pertama, BUIC meningkatkan kapasitas produksi Banyu Urip. Kedua, Bojonegoro menerima DBH migas sekitar Rp1,94 triliun, sementara keseluruhan transfer pusat mencapai sekitar Rp5,18 triliun. Ketiga, meskipun PAD tumbuh secara proporsional, struktur pendapatan masih didominasi transfer. Mekanisme yang dapat disimpulkan dari data adalah adanya eksposur terhadap arsitektur transfer dan pendapatan berbasis sumber daya; mekanisme "transfer menurunkan insentif pajak" belum dapat disimpulkan dari desain penelitian ini.

Literatur Bojonegoro memperkuat pentingnya tata kelola, bukan sekadar besarnya dana. Bisri et al. (2025) menekankan optimalisasi DBH, dana abadi, dan efisiensi fiskal, sementara Brunnschweiler et al. (2025) memperlihatkan bahwa kebijakan transparansi penerimaan belum otomatis menghasilkan keterlibatan warga yang merata. Temuan tersebut relevan bagi agenda diversifikasi: instrumen seperti dana abadi dapat dipertimbangkan untuk tujuan antargenerasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kerangka regulasi, kapasitas investasi, akuntabilitas, dan keterhubungan dengan strategi pembangunan daerah. Karena itu, dana abadi tidak diposisikan sebagai solusi tunggal.

Implikasi bagi Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal Bojonegoro pada 2025 memperlihatkan pola transisi yang belum selesai. Peningkatan porsi PAD menjadi 17,73% adalah sinyal positif, tetapi dominasi transfer pusat sebesar 80,01% menunjukkan bahwa perbaikan PAD belum cukup mengubah struktur pendapatan. Temuan ini konsisten dengan studi yang menempatkan PAD sebagai basis utama kemandirian (Syafri et al., 2024; Ulah, 2025), namun juga perlu dibaca bersama bukti bahwa transfer tidak selalu melemahkan penerimaan lokal (Saptono & Mahmud, 2023). Dengan demikian, sasaran kebijakan yang lebih tepat bukan "mengurangi transfer" secara mekanis, melainkan memperbesar kapasitas PAD yang efisien dan adil, meningkatkan kualitas belanja, dan membangun bantalan fiskal terhadap volatilitas sumber daya.

Dari perspektif pengelolaan risiko, ketergantungan pada transfer dan DBH membuat perencanaan menengah lebih penting. Skenario penurunan harga, lifting, atau perubahan formula transfer perlu dimasukkan ke proyeksi 3–5 tahunan. Pada sisi pengeluaran, komposisi 2025 menunjukkan kebutuhan untuk menjaga ruang belanja modal dan belanja produktif tanpa menyederhanakan seluruh belanja pegawai maupun barang/jasa sebagai

tidak produktif. Evaluasi berikutnya sebaiknya menggunakan klasifikasi belanja per fungsi dan output sehingga kualitas belanja dapat diukur lebih akurat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama kemandirian fiskal Bojonegoro pada 2025 adalah persistensi dominasi transfer pemerintah pusat di tengah perbaikan PAD. Berdasarkan data realisasi, PAD meningkat dari 13,94% total pendapatan pada 2022 menjadi 17,73% pada 2025, sedangkan transfer pusat tetap mencapai 80,01% total pendapatan pada 2025. Angka tersebut menggantikan proyeksi sebelumnya yang menempatkan ketergantungan pada 89,32%. Realisasi belanja 2025 juga menunjukkan bahwa belanja pegawai dan barang/jasa mencapai sekitar 49,74% total belanja, sedangkan belanja modal 18,44%. Karena desain penelitian bersifat deskriptif, pola pendapatan dan belanja tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan flypaper effect atau resource curse secara kausal.

Metode studi kasus berbasis dokumen sesuai untuk memetakan struktur fiskal dan merekonsiliasi angka lintas-sumber, tetapi memiliki keterbatasan: tidak menggunakan data panel jangka panjang, tidak mengestimasi elastisitas respons belanja, dan bergantung pada klasifikasi laporan fiskal yang dapat berubah. Karena itu, rekomendasi dibatasi pada temuan yang tervalidasi. Pertama, pemerintah daerah perlu meneruskan penguatan PAD melalui peningkatan basis pajak/retribusi, administrasi, dan kepatuhan tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Kedua, dominasi transfer pusat sebesar 80,01% menuntut skenario risiko fiskal 3–5 tahunan untuk mengantisipasi volatilitas DBH dan perubahan transfer. Ketiga, ruang bagi belanja modal dan belanja produktif perlu dilindungi dengan target menengah yang dapat diaudit. Keempat, pemanfaatan instrumen dana abadi sebaiknya dilakukan setelah kesiapan regulasi, tata kelola investasi, akuntabilitas, dan tujuan antargenerasi dinyatakan secara jelas. Penelitian lanjutan perlu menguji hubungan kausal transfer-PAD-belanja menggunakan panel data dan membedakan jenis transfer secara lebih rinci.

Daftar Pustaka

Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? Regional Science Policy & Practice, 13(6), 1842–1866. https://doi.org/10.1111/rsp3.12326

Alazhari, M. A., & Hendaris, R. B. (2025). Tax effort, flypaper dynamics, and fiscal stress: An empirical study of regional financial independence. *E-Jurnal Akuntansi*, *35*(5), 1746–1760. https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i05.p18

Aritenang, A. F. (2020). The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, *25*(3), 571–590. https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352

Bisri, A. M., Muchlip, M., & Hidyatin, D. A. (2025). Optimalisasi dana bagi hasil migas untuk pembangunan berkelanjutan dengan dana abadi dan efisiensi fiskal di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, *18*(1), 207–211.

Brunnschweiler, C., Lujala, P., Putri, P., Scherzer, S., & Wardhani, I. (2025). When petroleum revenue transparency policy meets citizen engagement reality: Survey evidence from Indonesia. *Ecological Economics, 230*, *108529*. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2025.108529

Chalil, T. M. (2018). The size of flypaper effect in decentralizing Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *2*(2), 101–119. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i2.37

Haryanto, J. T. (2017). Comparative analysis of financial performance in fiscal decentralization era among natural and non-natural resources regions. *Jurnal Bina Praja*, *9*, 171–184. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.171-184

Hidayat, R., Erlina, & Badaruddin. (2024). Impact of local revenue (PAD) and transfer funds on regional financial independence in North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, *13*(1), 458–466.

Hilmawan, R., & Clark, J. (2019). An investigation of the resource curse in Indonesia. *Resources Policy, 64*, *101483*. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101483

Khairi, H. (2021). Keseimbangan antara penyerahan kewenangan dan penyerahan sumber penerimaan daerah di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *13*, 431–443. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.431-443

Kinanti, A. R., & Santorry, S. (2025). Pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2014–2024. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *9*(2), 138–157. https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i2.3558

Meliza, M., & Ulum, A. S. (2025). The role of institutional quality in moderating tax revenue, revenue-sharing funds from natural resources, and government expenditure on inclusive economic growth. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, *29*(2), 195–206. https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art1

Nurosidah, S., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). Intergovernmental transfers reduction policy and flypaper effect: Case of COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *15*(1), 1–18. https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p001

Putri, A. A. P., Masdar, R., Furqan, A. C., Lucyani, M., & Betty. (2025). The effect of regional original revenue (PAD) and transfer funds on the financial efficiency of local governments in Indonesia. *Amkop Management Accounting Review*, *5*(2). https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3448

Rahmawati, M. O., & Kartikasari, L. (2025). Interpretasi LKPD Kabupaten Bojonegoro pasca pandemi COVID-19 melalui analisis kondisi keuangan tahun 2022–2024. *Jurnal Acitya Ardana*, *5*(2), 143–154. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/3326

Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or enforcement? How intergovernmental transfers crowd-in local taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, *51*(6), 782–837. https://doi.org/10.1177/10911421231191961

Sholikin, A. (2018). Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam (minyak bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, *15*(1), 35–50. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131

Syafri, S., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *9*(4), 277–290. https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858

Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *MethodsX, 8*, *101387*. https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387

Ulah, M. (2025). The impact of GDP per capita, intergovernmental transfers, and labor force on regional financial independence in East Java, Indonesia: A panel data analysis. *Journal of Regional Economics Indonesia*, *6*(1). https://doi.org/10.26905/jrei.v6i1.15227

Yasa, P. G. A. S. (2021). Distribution and revenue sharing of natural resources in Indonesia: Autonomous region and legal pluralism perspective. *Udayana Journal of Law and Culture*, *5*(2). https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Sistem Informasi Keuangan Daerah: Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, realisasi APBD sampai dengan Desember 2025 [Data set]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025, June 27). Tambahan 30 ribu barel per hari Blok Cepu, target lifting di depan mata. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tambahan-30-ribu-barel-per-hari-blok-cepu-target-lifting-di-depan-mata

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023. https://bojonegorokab.go.id/storage/transparansi-anggaran-2023/25_APBD2023_PERUBAHAN_7._CALK_2023_AUDITED_PLUS_LAMPIRAN_COMPRESSED.PDF

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025a). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024. https://bojonegorokab.go.id/storage/transparansi-anggaran-2025/25.Informasi_CaLK_Pemerintah_Daerah.PDF

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025b, December 23). DBH migas Bojonegoro tahun 2025 capai Rp1,94 triliun. https://bojonegorokab.go.id/berita/9163/dbh-migas-bojonegoro-tahun-2025-capai-rp-194-triliun